

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Karesidenan Kedu

Karesidenan adalah suatu pembagian administratif di Indonesia yang digunakan pada masa Hindia Belanda hingga sekitar tahun 1950-an. Pada periode tersebut, karesidenan berfungsi sebagai pembagian provinsi di beberapa wilayah, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Setiap karesidenan terdiri dari beberapa kabupaten, dan istilah ini hanya diterapkan di daerah dengan populasi yang cukup besar.¹

Kata "karesidenan" berasal dari bahasa Belanda, yakni "*Residentie*". Tiap karesidenan dipimpin oleh seorang residen, dan di atasnya terdapat gubernur jenderal yang memerintah atas nama Raja dan Ratu Belanda. Krisis pada tahun 1950-an menyebabkan penghapusan karesidenan, dan pemerintahan daerah hanya menggunakan istilah "kabupaten". Meskipun begitu, sebutan "Eks-Karesidenan" masih digunakan secara informal. Warisan sejarah karesidenan masih terlihat dalam pembagian tanda kendaraan bermotor, khususnya di Pulau Jawa, yang masih merujuk pada karesidenan.

Karesidenan Kedu (juga dieja Kedoe atau Kedoo) adalah unit administratif yang berlaku di Jawa Tengah pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan beberapa tahun sesudahnya. Meskipun Karesidenan Kedu sudah dihapus, namun masih dipertahankan dalam konteks administrasi pemerintahan provinsi sebagai Daerah Pembantu Gubernur Wilayah Kedu. Wilayah karesidenan ini melibatkan Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen,

¹ Jateng, *BPCP "Rumah Dinas Residen Kedu"*. (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, 2020).

Kabupaten Purworejo (sebelumnya disebut Begelen), dan Kabupaten Wonosobo.²

Pada mulanya, Karesidenan Kedu hanya mencakup Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung pada abad ke-19. Pada tahun 1818, pusat Karesidenan Kedu terletak di sebuah kota di Kabupaten Magelang, yang pada akhirnya menjadi wilayah Kota Magelang setelah dimekarkan. Nama "Kedu" diambil dari desa dan kecamatan di Kabupaten Temanggung, yaitu Kecamatan Kedu. Berikut adalah peta wilayah Karesidenan Kedu di Jawa Tengah.

Gambar 4. 1 Peta Karesidenan Kedu, Jawa Tengah



Sumber: Peta Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 4.1, Karesidenan Kedu terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang.

1. Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo, bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan wilayah Eks Karesidenan Kedu, berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Kebumen di barat. Lokasinya terletak antara 109°47'28" - 110°8'20" Bujur Timur dan 7°54' Lintang Selatan, dengan luas wilayah mencapai 1.034,81752 km². Administratif, Kabupaten Purworejo

² Jateng, BPCP "Rumah Dinas Residen Kedu". (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, 2020).

terbagi menjadi 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 804.335 jiwa.³

2. Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo, wilayah bekas Karesidenan Kedu di Provinsi Jawa Tengah, terletak di antara 7°11' dan 7°36' Lintang Selatan, serta 109°43' hingga 110°04' Bujur Timur. Berbatasan di utara dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, di timur dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, di selatan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo, serta di barat dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo mencapai 984,68 km², dengan 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo mencapai 896.346 jiwa.⁴

3. Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung, dulunya bagian dari Karesidenan Kedu, terletak antara 110°23' - 110°46'30" Bujur Timur dan 7°14' - 7°32'35" Lintang Selatan Timur. Berbatasan di utara dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, di selatan dengan Kabupaten Magelang, di barat dengan Kabupaten Wonosobo, dan di timur dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 266 desa dan 23 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung mencapai 790.174 jiwa.⁵

4. Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen, sebelumnya termasuk dalam Karesidenan Kedu, memiliki wilayah astronomis di antara 7°27' - 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur. Berbatasan di utara dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, di selatan dengan Samudra Hindia, di barat dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta di timur dengan Kabupaten Purworejo. Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 26 kecamatan, dengan jumlah penduduk mencapai 1.421.143 jiwa.⁶

³ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo", (2022).

⁴ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo", (2022).

⁵ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung", (2022).

⁶ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen", (2022).

5. Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang, sebelumnya termasuk dalam Karesidenan Kedu di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan di utara dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah timur dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, serta di sebelah barat dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Di bagian tengah wilayah tersebut terdapat Kota Magelang. Secara astronomis, Kabupaten Magelang terletak antara $110^{\circ}01'52''$ dan $110^{\circ}26'58''$ Bujur Timur serta antara $7^{\circ}19'13''$ dan $7^{\circ}42'16''$ Lintang Selatan. Kabupaten Magelang terbagi menjadi 21 kecamatan, dengan jumlah penduduk mencapai 1.363.290 jiwa.⁷

6. Kota Magelang

Kota Magelang, yang dulunya termasuk dalam Karesidenan Kedu di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara $110^{\circ}12'30''$ - $110^{\circ}12'52''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}26'18''$ - $7^{\circ}30'9''$ Lintang Selatan. Batas wilayah Kota Magelang melibatkan Kecamatan Secang di sisi utara, Kecamatan Tegalrejo di sisi timur, Kecamatan Mertoyudan di sisi selatan, dan Kecamatan Bandongan di sisi barat. Kota Magelang terbagi menjadi 3 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 18.5364 km². Jumlah penduduk Kota Magelang tercatat sebanyak 128.152 jiwa.⁸

2. Gambaran Umum Variabel

a. Kondisi Kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu

Keadaan kemiskinan melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan pendapatan rendah, tingkat buta huruf, kesehatan yang kurang, ketidaksetaraan gender, dan kondisi lingkungan yang buruk. Kemiskinan tidak hanya dipandang dari segi ekonomi semata, tetapi juga sebagai kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, yang mengakibatkan perlakuan yang tidak setara dalam menjalani kehidupan dengan martabat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki komitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan ini melalui pembangunan berkelanjutan, yang

⁷ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang", (2022).

⁸ "Badan Pusat Statistik Kota Magelang", (2022).

mencakup penetapan standar untuk mengidentifikasi masyarakat yang mengalami kemiskinan. Badan Pusat Statistika (BPS) mendefinisika kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan makanan dan non-makanan. Berikut adalah data presentase penduduk miskin di bekas wilayah Karesidenan Kedu.

Tabel 4. 1
Persentase Kemiskinan Eks Karesidenan Kedu
Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kot a	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	11.6 7	11.4 5	11.7 8	12.4	11.5 3
Kab. Wonosobo	17.5 8	16.6 3	17.3 6	17.6 7	16.1 7
Kab. Temanggung	9.87	9.42	9.96	10.1 7	9.33
Kab. Kebumen	17.4 7	16.8 2	17.5 9	17.8 3	16.4 1
Kab. Magelang	11.2 3	10.6 7	11.2 7	11.9 1	11.0 9
Kota Magelang	7.87	7.46	7.58	7.75	7.1

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 4.1 menampilkan persentase kemiskinan di wilayah Karesidenan Kedu untuk tahun 2018-2022. Kabupaten/Kota yang disertakan dalam tabel ini meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Data presentase kemiskinan tersebut menunjukkan variabilitas dari tahun ke tahun, di mana angka-angka tersebut merefleksikan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2018, Kabupaten Purworejo memiliki presentase kemiskinan sebesar 11.67%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami fluktuasi kecil sebesar 11.45% dan 11.78% secara berturut-turut. Namun, pada tahun 2021, angkanya meningkat menjadi 12.4%, sebelum kembali turun menjadi 11.53% pada tahun 2022.

Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren penurunan kemiskinan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, presentase kemiskinan mencapai 17.58%, tetapi mengalami penurunan menjadi 16.17% pada tahun 2022.

Kabupaten Temanggung juga menunjukkan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun, dengan presentase kemiskinan berkisar antara 9.33% pada tahun 2022 hingga 9.96% pada tahun 2020.

Kabupaten Kebumen mengalami penurunan presentase kemiskinan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, presentasinya sebesar 17.47%, dan mengalami penurunan menjadi 16.41% pada tahun 2022.

Kabupaten Magelang dan Kota Magelang menunjukkan fluktuasi kecil dalam presentase kemiskinan dari tahun ke tahun. Pada umumnya, terdapat kecenderungan penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa fluktuasi angka kemiskinan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Meskipun beberapa daerah mengalami penurunan, evaluasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendasari perubahan tersebut.

Penting untuk mencatat bahwa kemiskinan dapat diukur dengan berbagai indikator, dan presentase kemiskinan di sini mencerminkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan relatif terhadap total populasi. Oleh karena itu, interpretasi perubahan angka kemiskinan perlu mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial yang lebih luas.

b. Produk Domestik Regional Bruto di Eks Karesidenan Kedu

Salah satu indikator krusial dalam mengevaluasi kondisi ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencakup nilai tambah yang dihasilkan dari total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit usaha ekonomi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Unit usaha ekonomi tersebut mencakup sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, perdagangan,

hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan berbagai jenis layanan.

PDRB bukan hanya berfungsi sebagai indikator kinerja ekonomi suatu wilayah, tetapi juga memberikan gambaran potensi ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah data pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di wilayah Karesidenan Kedu.

Tabel 4. 2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan
Usaha
di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	5.33	5.44	-1.61	3.31	5.36
Kab. Wonosobo	5.06	5.57	-1.64	3.68	5.02
Kab. Temanggung	5.13	5.05	-2.13	3.34	5.2
Kab. Kebumen	5.53	5.52	-1.45	3.71	5.79
Kab. Magelang	5.28	5.3	-1.67	3.48	5.46
Kota Magelang	5.46	5.44	-2.45	3.2	5.77

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 4.2 memberikan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di wilayah Karesidenan Kedu pada periode tahun 2018-2022. Kabupaten/Kota yang tercakup dalam tabel ini mencakup Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Angka-angka dalam tabel mencerminkan persentase pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun untuk masing-masing daerah.

Pada tahun 2018, Kabupaten Purworejo mencatat laju pertumbuhan PDRB sebesar 5.33%, yang kemudian mengalami fluktuasi pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan sebesar -1.61%, namun kembali pulih pada tahun 2021 dan 2022 dengan pertumbuhan masing-masing 3.31% dan 5.36%.

Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren serupa, dengan pertumbuhan positif pada tahun 2018 dan 2019, diikuti penurunan pada tahun 2020 (-1.64%). Namun, laju pertumbuhan kembali positif pada tahun 2021 (3.68%) dan 2022 (5.02%).

Kabupaten Temanggung mencatat pertumbuhan PDRB yang relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2022. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 (-2.13%), kabupaten ini pulih pada tahun-tahun berikutnya, mencapai pertumbuhan 3.34% pada tahun 2021 dan 5.2% pada tahun 2022.

Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Magelang menunjukkan pola pertumbuhan yang serupa, dengan fluktuasi yang relatif kecil dari tahun ke tahun. Keduanya mengalami penurunan pada tahun 2020, diikuti oleh pemulihan pada tahun-tahun berikutnya.

Kota Magelang juga mengalami fluktuasi pertumbuhan PDRB yang mirip dengan kabupaten lainnya, dengan penurunan pada tahun 2020 (-2.45%) dan pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 5.77%.

Secara keseluruhan, analisis data tersebut menunjukkan variasi pertumbuhan PDRB di wilayah Karesidenan Kedu selama periode 2018-2022, dengan beberapa daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan peristiwa tertentu yang memengaruhi sektor-sektor ekonomi lokal.

c. Tingkat Pendidikan di Eks Karesidenan Kedu

Kemajuan tingkat pendidikan di Eks Karesidenan Kedu mencerminkan keseriusan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sektor pendidikan di wilayah ini terus ditingkatkan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perkembangan yang berkelanjutan dalam tingkat pendidikan tercermin dalam peningkatan angka melek huruf di kalangan penduduk. Peningkatan yang signifikan dalam angka melek huruf ini membentuk dasar yang kokoh untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengamatan terhadap perkembangan indikator ini menjadi hal yang sangat penting. Berikut adalah presentase tingkat pendidikan di bekas wilayah Karesidenan Kedu berdasarkan Angka Melek Huruf.

**Tabel 4. 3 Persentase Angka Melek Huruf
di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	99.03	99.43	99.46	99.45	99.44
Kab. Wonosobo	98.36	96.87	99.54	99.55	99.43
Kab. Temanggung	98.77	98.93	99.52	99.51	99.52
Kab. Kebumen	99.63	98.52	99.59	99.49	99.48
Kab. Magelang	97.55	98.64	99.49	99.48	99.48
Kota Magelang	99.32	99.20	99.31	99.3	99.27

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 4.3 memberikan gambaran tingkat melek huruf di wilayah Karesidenan Kedu selama periode 2018-2022. Kabupaten/Kota yang tercakup dalam tabel ini termasuk Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Analisis data ini mencerminkan persentase penduduk yang memiliki tingkat melek huruf pada rentang waktu tersebut.

Pada tahun 2018, tingkat melek huruf Kabupaten Purworejo mencapai 99.03%, yang mengalami kenaikan hingga mencapai 99.44% pada tahun 2022.

Tingkat melek huruf Kabupaten Wonosobo mencatatkan 98.36% pada tahun 2018. Meskipun mengalami penurunan ke 96.87% pada tahun 2019, tetapi berhasil pulih dan bahkan melebihi sebelumnya, mencapai 99.43% pada tahun 2022.

Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan yang stabil dalam tingkat melek huruf dari tahun 2018 hingga 2022, mencapai 99.52% pada tahun 2020 dan 2022.

Terdapat peningkatan signifikan dalam tingkat melek huruf Kabupaten Kebumen dari 99.63% pada tahun 2018 menjadi 99.48% pada tahun 2022, setelah mencapai 99.5% serta 99.49% pada tahun 2020 dan 2021.

Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi kecil dalam tingkat melek huruf. Meskipun mengalami penurunan sedikit pada tahun 2019, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Kota Magelang mencatat tingkat melek huruf yang tinggi pada tahun 2018 (99.32%), tetapi mengalami penurunan ke 99.27% pada tahun 2022. Ini menjadi titik perhatian dan mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan tersebut.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa tingkat melek huruf di wilayah Karesidenan Kedu cenderung tinggi. Meskipun demikian, beberapa daerah mengalami fluktuasi kecil atau penurunan sedikit, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti program pendidikan, aksesibilitas, dan inisiatif pemerintah setempat. Evaluasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk daerah yang mengalami penurunan, seperti Kota Magelang, guna mengidentifikasi dan mengatasi potensi permasalahan yang mungkin muncul.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka di Eks Karesidenan Kedu

Pengangguran mengacu pada situasi yang melibatkan penduduk yang aktif mencari pekerjaan, sedang menyiapkan usaha sendiri, menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, atau memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mencerminkan proporsi pengangguran di setiap 100 penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja. Tingkat pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan peluang kerja di pasar tenaga kerja.

Angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni mereka yang menganggur dan mereka yang sedang bekerja. Jika angkatan kerja tidak dapat bekerja, hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai. Kondisi seperti itu dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Berikut adalah data

mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah Karesidenan Kedu.

Tabel 4. 4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	4.43	2.91	4.04	3.59	4.45
Kab. Wonosobo	3.5	3.43	5.37	5.26	5.01
Kab. Temanggung	3.32	2.98	3.85	2.62	2.54
Kab. Kebumen	5.48	4.69	6.07	6.03	5.92
Kab. Magelang	2.89	3.07	4.27	5.03	4.97
Kota Magelang	4.78	4.37	8.59	8.73	6.71

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 4.4 menyajikan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di bekas wilayah Karesidenan Kedu pada rentang tahun 2018-2022. Kabupaten/Kota yang tercakup dalam tabel ini mencakup Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Angka-angka dalam tabel ini mencerminkan proporsi pengangguran dalam setiap 100 penduduk angkatan kerja selama periode waktu tersebut.

Pada tahun 2018, Kabupaten Purworejo mencatat TPT sebesar 4.43%, yang mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 2.91%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 (4.04%) dan 2022 (4.45%).

Kabupaten Wonosobo menunjukkan variasi TPT selama periode tersebut, dengan peningkatan pada tahun 2020 (5.37%) dan penurunan pada tahun 2022 (5.01%).

Kabupaten Temanggung mencatat penurunan yang signifikan dalam TPT dari tahun 2018 hingga 2022, mencapai titik terendah pada tahun 2022 dengan persentase 2.54%.

Kabupaten Kebumen mencatat fluktuasi TPT selama periode tersebut, dengan peningkatan pada tahun 2020 (6.07%) dan penurunan sedikit pada tahun 2022 (5.92%).

Kabupaten Magelang menunjukkan variasi TPT yang relatif kecil, dengan kenaikan pada tahun 2021 (5.03%) dan penurunan sedikit pada tahun 2022 (4.97%).

Kota Magelang mencatat peningkatan yang signifikan dalam TPT pada tahun 2020 (8.59%), yang kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 6.71% pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, analisis data tersebut menunjukkan fluktuasi TPT di wilayah Karesidenan Kedu selama periode 2018-2022, dengan beberapa daerah mengalami peningkatan pada tahun tertentu dan yang lain mengalami penurunan. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi lokal, kebijakan ketenagakerjaan, dan peristiwa tertentu yang memengaruhi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

3. Hasil Analisis Data

a. Temuan Hasil Penelitian

Dalam menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, peneliti melakukan serangkaian uji spesifikasi model. Salah satu uji yang dilakukan:

1. Uji Chow

Untuk menentukan model yang lebih cocok antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Jika nilai probabilitas *Cross Section F* kurang dari $\alpha = 5\%$ maka H_1 diterima, sedangkan jika nilai probabilitas *Cross Section F* melebihi dari $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Hasil Uji Chow menggunakan *Redundant Fixed Effect-Likelihood Ratio*.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	81.752734	(5,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	90.561391	5	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Pada tabel 4.5 di atas, hasil Uji Chow menunjukkan nilai Probabilitas *Cross Section F* sebesar 0.0000, Karena nilai ini kurang dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.0000 < 0.05$), H_a diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih sesuai adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, penelitian melanjutkan dengan melakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah model yang paling tepat adalah *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pilihan antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Jika probabilitas hasil *Cross Section random* melebihi tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima. Hipotesis yang diajukan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Hasil Uji Hausman menggunakan *Correlated Random Effect-Hausman Test*.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	195.347105	3	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Dalam Tabel 4.6 di atas, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai *Cross-section random* sebesar 0.0000. Karena nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ ($0.0000 < 0.05$), H_a diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Dengan

demikian, pemilihan selanjutnya, seperti Uji *Lagrange Multiplier*, tidak perlu dilakukan karena sudah pasti *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi pilihan terbaik untuk menjawab tujuan penelitian.

3. Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Tabel 4. 7 Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.569402	1.800878	4.203172	0.0004
X1	-0.023700	0.010091	-2.348675	0.0287
X2	0.051447	0.018530	2.776496	0.0113
X3	-0.019539	0.029734	-0.657128	0.5182

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.987696	Mean dependent var	12.43533	
Adjusted R-squared	0.983009	S.D. dependent var	1.116688	
S.E. of regression	0.145558	Akaike info criterion	-0.773162	
Sum squared resid	0.444928	Schwarz criterion	-0.352803	
Log likelihood	20.59743	Hannan-Quinn criter.	-0.638686	
F-statistic	210.7289	Durbin-Watson stat	2.161955	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil tersebut dapat dirumuskan sebagai persamaan regresi berikut:

$$Y = 7.56940198158 - 0.0236997203829 \cdot X1 + 0.0514471936139 \cdot X2 - 0.0195391946105 \cdot X3 + [CX=F]$$

Di mana:

Y = Kemiskinan (Presentase Jumlah Penduduk Miskin)

X1 = PDRB (Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha)

X2 = Pendidikan (Presentase Angka Melek Huruf)

X3 = Pengangguran (Presentase TPT)

Berdasarkan hasil estimasi data panel tersebut, kemudian diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 7.56940198158 maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rerata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 7.56940198158
- b) Nilai Koefisien Regresi Variabel X1 bernilai negatif (-) sebesar 0.0236997203829 dapat diartikan bahwa jika variabel X1 menurun maka variabel Y juga ikut menurun sebesar 0.0236997203829, begitu juga sebaliknya.
- c) Nilai Koefisien Regresi Variabel X2 bernilai positif (+) sebesar 0.0514471936139 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0.0514471936139, dan sebaliknya.
- d) Nilai Koefisien Regresi Variabel X3 bernilai negatif (-) sebesar 0.0195391946105 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 menurun maka variabel Y juga ikut menurun sebesar 0.0195391946105, begitu juga sebaliknya.

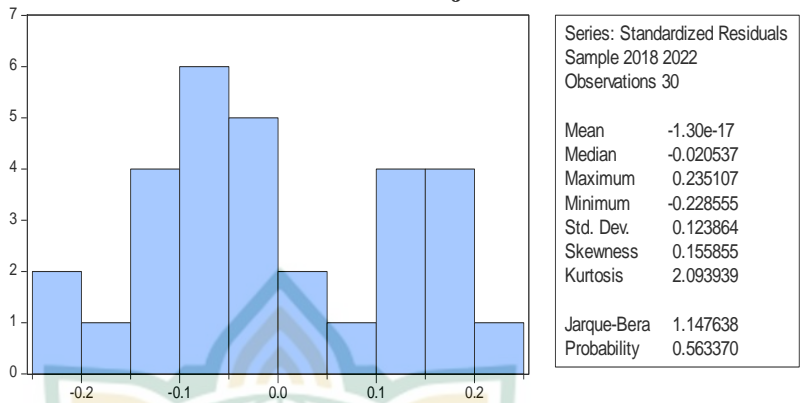
4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menguji kecocokan model regresi data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam konteks regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), suatu uji Heteroskedastisitas diperlukan untuk menilai kecocokan data tersebut.

a) Uji Normalitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan apakah data penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Kepentingan normalitas muncul karena model regresi yang optimal diharapkan memiliki data yang terdistribusi normal. Hasil uji normalitas diperoleh melalui analisis grafis dan perbandingan nilai probabilitas *Jarque-Bera*.

Gambar 4. 2 Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data Sekunder EvIEWS 9

Dengan mengacu pada gambar diagram 4.2 di atas, diperoleh nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 1.147638. Angka tersebut berada di atas tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memiliki distribusi yang bersifat normal.

b) Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengenali keberadaan hubungan yang signifikan antara variabel independen. Jika terdapat keterkaitan yang kuat di antara variabel independen, model regresi menjadi kurang optimal. Multikolinearitas umumnya dianggap terjadi ketika nilai korelasi antar variabel independen melebihi 0,8.

Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas

	PDRB_X1	Pendidikan_X2	Pengangguran_X3
PDRB_X1	1.000000	0.294078	0.253673
Pendidikan_X2	0.294078	1.000000	0.560700
Pengangguran_X3	0.253673	0.560700	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder EvIEWS 9

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel independen, yaitu PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran, memiliki nilai di bawah 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians dari residual pada model regresi. Uji *Glejser* digunakan untuk membuktikan adanya gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Panel Least Squares*.

Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas (Glesjer)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.631499	0.825103	-0.765357	0.4526
PDRB_X1	0.006113	0.004623	1.322136	0.2003
PENDIDIKAN_X2	0.006840	0.008490	0.805670	0.4295
PENGANGGURAN_X3	0.009331	0.013623	0.684955	0.5009

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Dengan merujuk pada tabel 4.9 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas (Prob.) untuk setiap variabel melebihi 0,05. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas yang terdeteksi pada model regresi.

d) Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi cenderung muncul pada data yang memiliki urutan waktu karena, berdasarkan karakteristiknya, data pada waktu tertentu dipengaruhi oleh data pada waktu-waktu sebelumnya. Metode untuk mengidentifikasi keberadaan autokorelasi dapat dilakukan melalui Uji Durbin Watson. Uji D-W merupakan salah satu

metode yang sering digunakan untuk menilai apakah autokorelasi hadir atau tidak.

Tabel 4. 10 Uji Autokolerasi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987696	Mean dependent var	12.43533
Adjusted R-squared	0.983009	S.D. dependent var	1.116688
S.E. of regression	0.145558	Akaike info criterion	-0.773162
Sum squared resid	0.444928	Schwarz criterion	-0.352803
Log likelihood	20.59743	Hannan-Quinn criter.	-0.638686
F-statistic	210.7289	Durbin-Watson stat	2.161955
Prob(F-statistic)	0.000000		

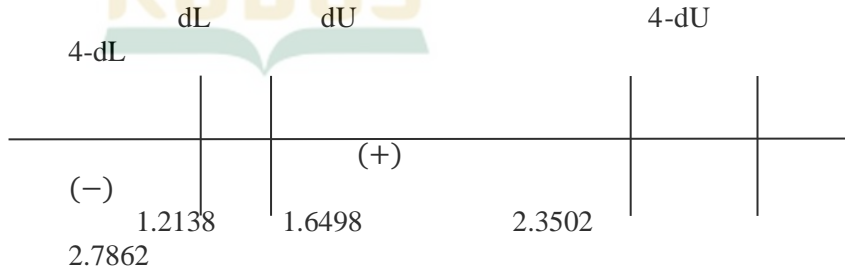
Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Dari Tabel 4.10, terlihat bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2.161. Selanjutnya, akan dibandingkan dengan nilai-nilai batas kritis dalam uji autokorelasi. Berdasarkan klasifikasi nilai *Durbin Watson* (DW) dengan tingkat signifikansi 5%, $k = 3$ (jumlah variabel independen), dan $n = 30$ (jumlah observasi), diperoleh nilai batas kritis sebagai berikut:

$$dL = 1.2138 \qquad 4-dL = 2.7862$$

$$dU = 1.6498 \qquad 4-dU = 2.3502$$

Gambar 4. 3 Uji Durbin Watson



Dengan nilai DW pada tabel 4.10 berada pada nilai 2.161, nilai dL sebesar 1.2138 dan nilai dU 1.6498, maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW pada tabel 4.10 berada $dU < DW < (4-dU)$ maka tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

5. Uji Hipotesis

Untuk menilai tingkat signifikansi dari setiap koefisien regresi variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap variabel tingkat kemiskinan, peneliti menggunakan uji statistik sebagai berikut:

a) Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengevaluasi dampak masing-masing variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu. Tujuan dari uji ini adalah untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam analisis ini adalah 5%. Proses pengambilan keputusan didasarkan pada aturan bahwa jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya, jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, hasil uji t memberikan panduan dalam menentukan apakah variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran secara parsial memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 4. 11 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.569402	1.800878	4.203172	0.0004
X1	0.023700	0.010091	-2.348675	0.0287
X2	0.051447	0.018530	2.776496	0.0113
X3	-0.019539	0.029734	-0.657128	0.5182

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Views 9

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 4.11 dapat dilakukan analisis terhadap pengaruh parsial masing-masing variabel independen (PDRB, pendidikan, dan pengangguran) terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu. Hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis Pengaruh PDRB (X1) Terhadap Kemiskinan

Variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0287. Nilai tersebut kurang dari 5% ($0.0287 < 0.05$), maka bisa disimpulkan bahwa H_a diterima.

2. Uji Hipotesis Pengaruh Pendidikan (X2) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0113. Nilai tersebut kurang dari 5% ($0.0113 < 0.05$), maka bisa disimpulkan bahwa H_a diterima.

3. Uji Hipotesis Pengaruh Pengangguran (X3) Terhadap Kemiskinan

Variabel Pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5182. Nilai tersebut melebihi dari 5% ($0.5182 > 0.05$), maka H_0 diterima.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, variabel PDRB dan Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kemiskinan di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan, variabel Pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perubahan kemiskinan di kota/kabupaten Eks Karesidenan Kedu.

b) Uji F-statistik

Uji F adalah alat bantu statistik yang berguna untuk menilai apakah semua koefisien regresi dari variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Dalam uji F, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$, yang menyiratkan bahwa secara keseluruhan variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Ha: salah satu $b \neq 0$, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan.⁹ Berikut merupakan hasil output uji F:

Tabel 4. 12 Uji F

<i>F-statistic</i>	210.7289
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.12, terlihat bahwa hasil uji F-statistic sebesar 210.7289 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 di mana nilai tersebut kurang dari 5% ($0.000000 < 0.05$). Dengan hasil tersebut Ha diterima, dan disimpulkan bahwa PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran mempengaruhi secara simultan terhadap kemiskinan di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana variasi dalam variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran. Jika nilai $R^2 = 0$, dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang berasal dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai $R^2 = 1$, maka pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat dianggap sempurna, menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 100% variasi dalam variabel dependen.¹⁰ Berikut adalah hasil *output* dari koefisien determinasi:

⁹ Anwar Hidayat, "Uji F dan Uji T", Januari 23, 2013, <https://www.statistika.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html?amp>.

¹⁰ Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS* (Yogyakarta: MediaKom, 2010), 66.

Tabel 4. 13
Uji R²

R-squared	0.987696
Adjusted R-squared	0.983009

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Dari Tabel 4.13, dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.987696, dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PDRB, pendidikan, dan pengangguran) mampu menjelaskan variabel dependen (kemiskinan) pada Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen sebesar 98,77%. Sementara itu, sekitar 1,23% sisanya kemungkinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

d) Interpretasi Hasil Analisis

Tabel 4. 14 Interpretasi Koefisien FEM

Variable	Coefficient
C	7.569402
PDRB?	0.023700
PENDIDIKAN?	0.051447
PENGANGGURAN?	-0.019539
Fixed Effects (Cross)	
KABKEB--C	1.511610
KABMAG--C	-0.376389
KABPUR--C	-0.236845
KABTEM--C	-0.894600

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder Eviews 9

Dari Tabel 4.14, terlihat bahwa masing-masing Kabupaten/Kota memiliki tingkat koefisien *Fixed Effect* yang berbeda satu sama

lain. Situasi ini menjelaskan variasi tingkat pengaruh yang berbeda-beda dari variabel PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di tiap-tiap Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu.

1. Kabupaten Kebumen

Dilihat dari Tabel 4.14, koefisien memiliki nilai 7.569402, dan nilai koefisien *Fixed Effect* untuk Kabupaten Kebumen (KABKEB) sebesar 1.511610. Ini menunjukkan bahwa perubahan 1% pada PDRB, pendidikan, dan pengangguran antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten Kebumen akan memberikan pengaruh individu terhadap tingkat kemiskinan sebesar 1.511610.

2. Kabupaten Magelang

Dilihat dari Tabel 4.14, koefisien memiliki nilai 7.569402, dan nilai koefisien *Fixed Effect* untuk Kabupaten Magelang (KABMAG) sebesar -0.376389. Artinya, perubahan 1% pada PDRB, pendidikan, dan pengangguran antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten Magelang akan memberikan pengaruh individu terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0.376389.

3. Kabupaten Purworejo

Dilihat dari Tabel 4.14, koefisien memiliki nilai 7.569402, dan nilai koefisien *Fixed Effect* untuk Kabupaten Purworejo (KABPUR) sebesar -0.236845. Ini berarti perubahan 1% pada PDRB, pendidikan, dan pengangguran antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten Purworejo akan memberikan pengaruh individu terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0.236845.

4. Kabupaten Temanggung

Dilihat dari Tabel 4.14, koefisien memiliki nilai 7.569402, dan nilai koefisien *Fixed Effect* untuk Kabupaten Temanggung (KABTEM) sebesar -0.894600. Jadi, perubahan 1% pada PDRB, pendidikan, dan pengangguran antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten Temanggung akan memberikan pengaruh individu terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0.894600.

5. Kabupaten Wonosobo

Dilihat dari Tabel 4.14, koefisien memiliki nilai 7.569402, dan nilai koefisien *Fixed Effect* untuk Kabupaten Wonosobo (KABWON) sebesar 1.417030. Ini berarti perubahan 1% pada PDRB, pendidikan, dan pengangguran antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten Wonosobo akan memberikan pengaruh individu terhadap tingkat kemiskinan sebesar 1.417030.

6. Kota Magelang

Dilihat dari Tabel 4.14, koefisien memiliki nilai 7.569402, dan nilai koefisien *Fixed Effect* untuk Kota Magelang (KOTMAG) sebesar -1.420805. Dengan demikian, perubahan 1% pada PDRB, pendidikan, dan pengangguran antar daerah maupun antar waktu di Kota Magelang akan memberikan pengaruh individu terhadap tingkat kemiskinan sebesar -1.420805.

B. Pembahasan (Komparasi A2 dengan teori/penelitian lain)

a. Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu

Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu menjadi fokus penting dalam mengevaluasi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil apabila mampu memberikan dampak positif secara merata pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penduduk miskin.¹¹ Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan PDRB per kapita. Para ahli meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran kunci dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama melalui sektor industri dan pertanian sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.¹² Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan mengindikasikan adanya hasil yang berbeda.

¹¹ Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia, 'Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2018', *Jejak* 8, no 1 (2018): 88-99, <<https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>>.

¹² Andian, "Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 2009-2019", *Jurnal Imiah* 2, no 2 (2019): 17-20.

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan variabel PDRB justru menunjukkan dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, di mana pertumbuhan ekonomi lebih cenderung memberikan keuntungan kepada golongan masyarakat menengah ke atas. Koefisien regresi PDRB sebesar -0.023700 mengindikasikan bahwa setiap penurunan 1% dalam PDRB per kapita akan berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,3%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan terdapat kecenderungan bahwa peningkatan PDRB tidak efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu.

Variabel PDRB di Eks Karesidenan Kedu memiliki dampak negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, bertolak belakang dengan temuannya Teori Kuznets. Teori ini, yang umumnya mengemukakan bahwa ketidaksetaraan akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dan kemudian menurun seiring dengan berkembangnya ekonomi, tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang diamati di Eks Karesidenan Kedu. Ketidaksesuaian ini mungkin menunjukkan bahwa dinamika distribusi pendapatan di wilayah tersebut tidak kompleks daripada apa yang dijelaskan oleh Teori Kuznets. Meskipun Teori Kuznets memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang ekonomi baru, yang pada gilirannya memang mengurangi tingkat kemiskinan.¹³

Selain itu, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Patria Nagara, Misharni, dan Syofria Meidona (2021) "Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat", yang menyatakan bahwa PDRB berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.¹⁴

Sedangkan, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marito Ritonga dan Tri Wulantika (2020) yang berjudul Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap

¹³ Endang dan Mustofa Mulyani, "Ekonomi Pembangunan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 6, no 3 (2019): 1–17.

¹⁴ Patria Nagara dkk., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan", *Klabat Journal of Management* 2, no 2 (2021): 98, <<https://doi.org/10.60090/kjm.v2i2.592.98-122>> .

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (2010-2018)".¹⁵ Hasil dari penelitian menyatakan bahwa PDRB memiliki dampak negatif dan signifikan pada tingkat kemiskinan di Batu Bara. Ada juga penelitian dari Muhammad Ricky Darmawan dan Rusdiansyah (2019) dengan judul "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin".¹⁶ Hasilnya, PDRB secara signifikan berdampak negatif pada tingkat kemiskinan, dan penelitian yang dilakukan oleh Uray Dian Novita, Nur Istiqamah (2018) "Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sambas", juga mengatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sambas.¹⁷

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan informasi yang telah diuraikan, terdapat korelasi antara peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan penurunan tingkat kemiskinan di eks Karesidenan Kedu. Namun, masalah kemiskinan masih tetap relevan di wilayah tersebut karena peningkatan PDRB masih terlalu lambat. Faktor ini dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang bekerja dalam sektor informal, khususnya pertanian, dengan asumsi bahwa yang terpenting bagi mereka adalah dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bertahan hidup. Dari perspektif petani, yang terpenting bagi mereka adalah dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bertahan hidup. Berdasarkan data, 17,28 juta penduduk miskin di Indonesia, 17,28 juta diantaranya adalah penduduk perdesaan yang kebanyakan berprofesi sebagai petani.¹⁸

¹⁵ Ritonga and Wulantika dan Tri Wulantika, "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)", *Jurnal Diversita* 6, no 1 (2020): 95-102, <<https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3135>> .

¹⁶ Darmawan dan Rusdiansyah, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin", *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, no 4 (2019): 925, <<https://doi.org/10.2052/jiep.v2i4.1229>>.

¹⁷ Uray Dian Novita dan Nur Istiqamah, "Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sambas", *Jurnal Manajemen Motivasi* 13, no 1 (2018): 815 <<https://doi.org/10.29406/jmm.v13i1.539>>.

¹⁸ Avi Budi Setiawan "Pangan Petani dan Kemiskinan", <<https://unnes.ac.id/feb/pangan-petani-dan-kemiskinan/>>.

PDRB memang erat kaitannya dengan produksi barang dan jasa pada suatu daerah. Namun, dalam konteks ini, menyatakan bahwa hubungan jumlah pengangguran dan orang miskin tidak selalu berkurang seiring dengan peningkatan PDRB, sama halnya dengan hubungan tersebut tidaklah signifikan jika orang-orang tersebut tidak bekerja.

Dalam perspektif ilmu syariah, ada anjuran untuk bekerja. Dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah” (QS. Al Jumu'ah: 10).¹⁹

Ayat tersebut dapat dihubungkan dengan konsep PDRB, di mana bekerja akan menghasilkan produk. Dalam kaitannya dengan penelitian yang mengemukakan bahwa peningkatan produksi tidak selalu mengurangi jumlah orang miskin, dapat dijelaskan bahwa dampaknya sebenarnya bersifat negatif. Sejalan dengan ajaran agama yang menganjurkan untuk bekerja, semakin banyak orang bekerja maka akan menghasilkan lebih banyak produk yang pada akhirnya dapat juga menjadikan pendapatan bertambah dan dapat mengurangi kemiskinan.

b. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu

Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu memegang peranan krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, nilai konstanta regresi pendidikan, yang diukur melalui angka melek huruf menunjukkan dampak yang signifikan. Temuan analisis menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam angka melek huruf di Eks Karesidenan Kedu akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0.051447, begitupun sebaliknya. Arah hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan adalah positif,

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 435.

mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dapat secara positif mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan.

Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Patria Nagara, Misharni, dan Syofria Meidona (2021) "Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat" dengan hasil pendidikan memberikan dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.²⁰ Selanjutnya, penelitian dari Muhammad Ricky Darmawan dan Rusdiansyah (2019) "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin", yang menyatakan bahwa variabel pendidikan memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan.²¹ Ada juga, penelitian yang dilakukan oleh Suropto dan Lalu Subayil (2020) "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017", justru sejalan dengan penelitian ini. Hasilnya tingkat pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.²²

Selain itu, teori pertumbuhan baru memberikan landasan konseptual untuk temuan ini. Teori tersebut menyoroti peran penting pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*). Investasi dalam pendidikan dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sejalan dengan hal tersebut, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula potensi peningkatan produktivitasnya, yang dapat tercermin dalam peningkatan pendapatan dan konsumsi. Dengan demikian, temuan ini memberikan dasar kuat bagi

²⁰ Patria Nagara dkk, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan", *Klabat Journal of Management* 2, no 2 (2021): 98, <<https://doi.org/10.60090/kjm.v2i2.592.98-122>> .

²¹ Darmawan dan Rusdiansyah, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin", *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, no 4 (2019): 925, <<https://doi.org/10.2052/jiep.v2i4.1229>>.

²² Suropto dan Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no 2 (2020): 127.

implementasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif di Eks Karesidenan Kedu sebagai langkah krusial dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²³

Menuntut ilmu hingga ke negeri China adalah suatu bentuk pendidikan yang sangat bernilai. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat kemiskinan. Konsep ini sejalan dengan ajaran agama yang juga menegaskan pentingnya pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Ayat Al Qur'an Surat Al-Alaq (96:1):

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” (QS. Al-Alaq, 5:1).²⁴

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa pendidikan memiliki nilai tinggi dalam Islam, sebagai fondasi untuk pemahaman agama, moralitas, dan perkembangan pribadi untuk memerdekakan diri dari kegelapan kebodohan. Tingkat pendidikan yang tinggi juga dapat menjadi kunci untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Program pendidikan seperti literasi dan pelatihan dapat membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dengan demikian, dalam upaya mengatasi kemiskinan, perlu memasukkan strategi pendidikan yang komprehensif, yang juga dapat berpengaruh pada tingkat pengangguran disuatu wilayah.

c. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu

Pengangguran merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.²⁵ Berdasarkan teori

²³ Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), 96.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Alaq Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 35.

²⁵ Trisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Implikasinya Di Indonesia", *Jurnal Akademia 2*, no 2 (2018): 245.

menurunnya tingkat pengangguran maka dapat menurunkan juga tingkat kemiskinan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan adalah pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dari hasil regresi nilai konstanta pengangguran yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar -0.019539 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% TPT maka akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Kedu sebesar 1,9%, dan sebaliknya. Arah hubungan antara TPT dengan tingkat kemiskinan yaitu tidak searah (-). Di mana kenaikan atau penurunan TPT berpengaruh negatif pada jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Kedu. Dalam penelitian ini, temuan menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu. Beberapa alasan yang mungkin melibatkan kompleksitas hubungan antara pengangguran dan kemiskinan yaitu struktur ekonomi lokal, faktor eksternal, metodologi penelitian, dan kualitas data. Hasil ini menunjukkan bahwa fenomena dapat dipahami melalui konteks lokal dan perubahan dalam hubungan ini memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Patria Nagara, Misharni, dan Syofria Meidona (2021) "Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat", yang menyatakan bahwa pengangguran berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.²⁶ Ada juga penelitian dari Deswita Adam, Fahrudin Zain Oliling dan Ivan Rahmat Santoso (2022) "Analisis Pengaruh Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara", yang hasil dari penelitiannya menunjukkan variabel pengangguran berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.²⁷ Terdapat juga penelitian dari Uray Dian Novita,

²⁶ Patria Nagara dkk, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan", *Klabat Journal of Management* 2, no 2 (2021): 98, <<https://doi.org/10.60090/kjm.v2i2.592.98-122>> .

²⁷ Adam, Olilingo, dan Santoso, Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara", *Jurnal Ekonomi STIE Muhammadiyah Palopo* 8, no 1 (2020): 97-111, <<https://doi.org/10.35906/jep.v8i1.1039>>.

Nur Istiqamah (2018) “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sambas”, yang hasilnya sejalan dengan hasil penelitian ini, dengan menyatakan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sambas.²⁸

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dapat diamati bahwa tingkat pekerjaan penuh di Eks Karesidenan Kedu didominasi oleh sektor pertanian, dengan mayoritas individu berstatus sebagai pekerja yang tidak mendapatkan upah. Banyak warga yang terpaksa ikut bekerja di sektor pertanian keluarganya untuk mengurangi biaya produksi pertanian, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bertahan hidup. Karena tingkat pendidikan yang masih rendah, mereka mungkin terpaksa menjadi pekerja keluarga karena kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bahkan sebagai buruh serabutan. Oleh karena itu, wilayah Eks Karesidenan Kedu memiliki tingkat pengangguran yang rendah, tetapi tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian daerah ini karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang belum mampu menampung semua pencari kerja. Ketergantungan pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan belum teratasinya masalah kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu. Dari perspektif petani, yang terpenting bagi mereka adalah dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bertahan hidup. Berdasarkan data, 17,28 juta penduduk miskin di Indonesia, 17,28 juta diantaranya adalah penduduk perdesaan yang kebanyakan berprofesi sebagai petani.²⁹

Terdapat dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁸ Uray Dian Novita dan Nur Istiqamah, "Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sambas", *Jurnal Manajemen Motivasi* 13, no 1 (2018): 815 <<https://doi.org/10.29406/jmm.v13i1.539>>.

²⁹ Avi Budi Setiawan "Pangan Petani dan Kemiskinan", <<https://unnes.ac.id/feb/pangan-petani-dan-kemiskinan/>>.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah” (QS. Al Jumu’ah: 10).³⁰

Dalam kaitannya dengan pengangguran dan kemiskinan, ayat ini dapat memberikan pandangan positif terhadap aktivitas bekerja dan mencari rezeki. Ketika umat Muslim bertebaran di muka bumi setelah mengerjakan salat, mereka diharapkan untuk aktif dan produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ayat ini dapat dihubungkan dengan pentingnya bekerja agar dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat.

Pengangguran yang tinggi, sebagaimana terungkap dalam analisis sebelumnya, dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan. Melalui kaitan dengan Surat Al Jumu’ah, dapat ditekankan bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pendapatan yang diperoleh melalui usaha dan pekerjaan yang halal akan membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pemahaman ini, implementasi kebijakan yang mendorong peluang pekerjaan berkualitas dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan serta pelatihan keterampilan dapat menjadi langkah yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan bertujuan untuk mengatasi dampak kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Surat Al-Jumu’ah Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 435.